

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia sudah menjamin Pengajaran dan Pendidikan yang layak untuk masyarakat Indonesia, hal ini sudah tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 54 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa *“setiap anak yang cacat mental maupun fisik berhak mendapatkan Pendidikan, perawatan, pelatihan dan mendapatkan bantuan khusus dari biaya negara, agar menjamin kehidupannya sesuai dengan taraf kemanusiaan, meningkatkan diri dan mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam bermasyarakat dan bernegara”*.

UU SIDKNAS Nomor 20 Tahun 2003 dalam pasal 5 ayat 2 juga disebutkan bahwa *“setiap warga negara yang mempunyai kelainan mental, fisik, emosional, intelektual dan social berhak mendapatkan pendidikan yang khusus”*. Pendidikan khusus adalah Pendidikan yang dirancang untuk peserta didik yang mengalami kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran dikarenakan mempunyai kelainan fisik, mental, emosional, intelektual maupun social dan mempunyai kemampuan yang istimewa dari yang lainnya (Daskalaki N. and Magoula E., 2005). Jika dikaji dari dua Undang-undang tersebut mengenai Pendidikan khusus atau Pendidikan inklusi yang disediakan untuk anak berkebutuhan khusus agar mereka juga mendapatkan kesempatan yang sama seperti siswa regular lainnya tanpa memandang kekurang fisik ataupun mental mereka, mereka yang terlahir istimewa juga membutuhkan perawatan dan Pendidikan guna menunjang kehidupan mereka di kemudian hari. Namun, Pendidikan yang diberikan kepada

anak berkebutuhan khusus juga harus menyesuaikan dengan keadaan mereka, penyesuaian dalam hal ini mencakup banyak hal

Dalam hal ini Pendidikan berlaku juga untuk Pendidikan inklusi. Pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan bakat dan minat anak dalam menggali potensi yang dimilikinya (Alfina & Anwar, 2020) dalam (Wuryandani, 2018). Adanya penyelenggaraan Pendidikan inklusi merupakan system pelayanan Pendidikan yang mengharuskan agar siswa yang mempunyai kebutuhan khusus memiliki kelas yang sama seperti siswa pada umumnya (Agustin, 2017).

Pendidikan inklusi dinilai untuk menjembatani dalam upaya mewujudkan Pendidikan yang berlaku untuk semuanya dan tidak ada yang tertinggal dari layanan Pendidikan (Widyawati, 2017) dalam (kemendikbud, 2012). Pendidikan inklusi merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang mempunyai kelainan fisik ataupun mental agar mempunyai kesempatan yang sama dengan siswa regular lainnya dan belajar dengan teman sesusianya, Pendidikan inklusi adalah upaya untuk mengurangi adanya sikap diskriminatif pada anak yang berkebutuhan khusus (Wardah, 2019). Memasukkan anak-anak dalam layanan khusus negara kesejahteraan dapat mengakibatkan pengecualian anak-anak ini dari komunitas sekolah umum (Qvortrup & Qvortrup, 2018).

Sekolah inklusi pada dasarnya merupakan sekolah umum yang di tunjuk sebagai sekolah inklusi. Oleh karena itu fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan merupakan fasilitas sarana prasarana pada umumnya. Pendidikan inklusi seharusnya memberikan pelayanan Pendidikan yang lebih efektif dan efisien un-

tuk anak berkebutuhan khusus dibandingkan anak berkebutuhan khusus menempuh Pendidikan di sekolah umum yang tidak berbasis inklusi (Saran, n.d.)

Perlunya perhatian berkelanjutan untuk pendidikan inklusif siswa di seluruh dunia, dan menyarankan kebutuhan khusus untuk peningkatan fokus pada pemeriksaan dan membangun praktik yang dapat diterapkan dalam pengaturan inklusif untuk mempromosikan hasil berharga yang dihasilkan dari pendidikan inklusif. Bergerak melampaui pemeriksaan strategi dalam pengaturan non- inklusif, dan membangun pengetahuan dasar yang telah dikembangkan terkait dengan kerangka teoritis dan faktor sikap, menyediakan sarana untuk pendekatan pendidikan inklusif yang lebih baik di seluruh dunia, mempromosikan hasil yang bermakna dan kewarganegaraan penuh untuk semua orang , termasuk penyandang disabilitas (Amor et al., 2019)

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2014) berdasarkan data yang dilansir Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemenkes RI), pada tahun 2011 siswa berkebutuhan khusus di Indonesia mencapai 7 juta atau sekitar 3% dari total warga negara Indonesia. Dari 7 juta tersebut, sebagian besar ditandai dengan karakteristik anak lamban belajar, autisme, dan disabilitas intelektual lainnya (Aisah & Santosa AB, 2019)

Dalam Pendidikan inklusi peran seorang guru sangatlah dibutuhkan baik secara akademik maupun non akademik. Adanya guru pendamping dalam Pendidikan inklusi mempunyai peran tidak hanya sebagai pendamping anak berkebutuhan khusus, tetapi juga untuk memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hunt & McDonnell

(2007) dalam penelitian (Bebetsos et al., 2014) Guru, orang tua, siswa dan administrator adalah pemangku kepentingan penting dalam gerakan untuk menciptakan sekolah inklusif. Sekolah dasar inklusi pastilah mempunyai fasilitas sarana dan prasarana serta pelayanan yang berbeda dengan sekolah dasar regular pada umumnya. Mendapatkan gelar sekolah inklusi banyak diperlukan beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Sesuai dengan amanat undang-undang, penyediaan layanan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), sekolah dasar harus bersedia menerima anak berkebutuhan khusus dan menjadi sekolah dasar inklusi. Namun masih banyak permasalahan ataupun kendala yang di timbulkan dari program Pendidikan

inklusi, kendala yang ditimbulkan dari Pendidikan inklusi diantaranya adalah biaya, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta masih kurangnya guru pendamping untuk anak berkebutuhan khusus (Agustin, 2017). Sekolah inklusi yang belum sepenuhnya optimal mencerminkan guru dan suasana yang simpatik terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) (Ariastuti & Herawati, 2016). Dari sinilah kita memahami bahwa Pendidikan inklusi masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dari mulai sarana prasarana, biaya, guru pendamping dan lain-lain.

Namun realitanya berdasarkan informasi yang di dapatkan dari informan melalui observasi peneliti menunjukkan bahwa di SD Tumbuh 2 Yogyakarta dan SD Taman Muda Ibu Pawiyatan tingkat kesadaran orangtua dalam bekerjasama dengan sekolah untuk mendidik anak-anaknya dapat dikatakan belum berjalan dengan lancar pada akhirnya menjadi kendala dalam pola manajemen Pendidikan inklusi di sekolah tersebut. Keberhasilan manajemen sekolah inklusi juga harus

ada dukungan dari stakeholder termasuk di dalamnya ada orangtua. Selain dari pada itu masih banyak guru yang masih perlu belajar banyak hal secara mandiri dan otodidak melalui internet, seminar atau workshop untuk mendidik anak berkebutuhan khusus karena guru yang mengajar di SD Tumbuh 2 Yogyakarta dan SD Taman Muda Ibu Pawiyatan mayoritas belum mempunyai pengalaman mengajar di sekolah inklusi sebelumnya dan bukan berlatar belakang Pendidikan khusus yang menjurus ke sekolah inklusi.

Dalam penelitian (Wardah, 2019) yang dilakukan di sekolah dasar inklusi Kabupaten Lumajang bahwa pendidikan inklusi di kabupaten tersebut masih banyak ditemui beberapa kendala yaitu guru pembimbing yang tidak berkompeten pada bidangnya yang ditunjuk oleh kepala sekolah, guru pembimbing tersebut adalah guru mata pelajaran yang bukan lulusan sarjana Pendidikan luar biasa yangakhirnya berdampak pada pelayanan dalam pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tidak berjalan dengan efektif karena kurangnya pengetahuan guru pembimbing di Lembaga tersebut. Serta perencanaan pembelajaran yang masih kurang optimal terutama pada program-program yang dikhususkan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Oleh karena itu pentingnya penelitian ini dilakukan guna mengetahui manajemen sekolah dasar inklusi, agar Pendidikan inklusi juga dapat berkembang dengan pengelolaan yang baik dengan sarana prasarana yang memadai serta guru pendamping yang berkompeten untuk mendampingi Anak Berkebutuhan khusus. Selain itu alasan penting penelitian ini dilakukan adalah agar menjadi bahan rujukan bagi sekolah untuk mengelola manajemen Pendidikan inklusi di SD Tum-

buh dan SD Taman Muda dengan baik sesuai dengan prinsip manajemen sekolah inklusi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dirancang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan manajemen sekolah dasar inklusi di SD Tumbuh 2 Yogyakarta dan SD Taman Muda Ibu Pawaiyatan
2. Bagaimana pengorganisasian evaluasi manajemen sekolah dasar inklusi di SD Tumbuh 2 Yogyakarta dan SD Taman Muda Ibu Pawaiyatan
3. Bagaimana pelaksanaan manajemen sekolah dasar inklusi di SD Tumbuh 2 Yogyakarta dan SD Taman Muda Ibu Pawaiyatan
4. Bagaimana pengawasan manajemen sekolah dasar inklusi di SD Tumbuh 2 Yogyakarta dan SD Taman Muda Ibu Pawaiyatan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sekolah inklusi di kota Yogyakarta
2. Untuk mengkaji bagaimana manajemen sekolah dasar inklusi di kota Yogyakarta.

3. Mengetahui hambatan dalam manajemen sekolah dasar inklusi di kota Yogyakarta.
4. Menemukan solusi dalam mengatasi hambatan manajemen sekolah dasar inklusi di kota Yogyakarta.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengorganisasian manajemen sekolah dasar inklusi di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah di jelaskan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- 1) Manfaat teoritis yang di dapat dalam penelitian ini adalah memperluas wawasan dan manambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai evalausi manajemen sekolah dasar inklusi di sekolah dasar inklusi.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Guru

Hasil penelitian bisa di manfaat sebagai salah satu acuan guru dalam memahami konsep manajemen sekolah dasar inklusi dan memahami serta meningkatkan pelaksanaan pembelajaran khususnya bagi siswa berkebutuhan khusus.

2) Bagi Sekolah

hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kesimpulan penelitian bisa di peroleh melalui interpretasi data yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dan bisa diperoleh dari hasil analisis. Saran-saran yang sudah dirumuskan berdasarkan hasil penelitian berisi tentang Langkah-langkah yang perlu di ambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang berhubungan. Saran ditujukan pada dua hal. Saran untuk memperluas hasil penelitian, contohnya perlu adanya penelitian lanjutan dan saran dalam menentukan kebijakan atau aturan terkait masalah dan fokus penelitian